

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka kelancaran jalannya pelaksanaan pembangunan di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan pemantapan otonomi di daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengembangkan sumber-sumber keuangan, disamping itu pemerintah daerah diharapkan akan mampu menggali potensi daerahnya sehingga sumber-sumber penerimaan daerah dapat ditingkatkan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009, kewenangan dalam pengelolaan rumah tangga daerah bertumpu pada kinerja dan kemampuan sumber daya daerah yang bersangkutan. Jadi pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Oleh sebab itu maka `Pendapatan asli daerah merupakan salah satu aspek penentu dalam keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. -Dalam rangka menunjang keberhasilan pengumpulan dana pembiayaan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah harus berusaha untuk menggali dan meningkatkan potensi yang ada didalamnya untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang murni digali sendiri oleh pemerintah daerah yang bersumber pada hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari beberapa sumber pendapatan di atas, Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu komponen yang sangat diandalkan guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten timor tengah selatan Hal ini karena setiap daerah memiliki potensi daerah yang bisa diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, walaupun berbeda daerah satu dengan yang lainnya, dan dengan pengelolaan yang tepat maka akan menjadi sumber pendapatan daerah yang ideal dan potensial bagi daerah yang bersangkutan

Karena hal tersebut di atas maka pemerintah daerah kabupaten timor tengah selatan menerapkan berbagai upaya dalam mengelola pajak bumi dan bangunan mulai dari pemuktahiran data ,penambahan obyek pajak baru meskipun pada awal pengelolaan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak baru bagi daerah masih mengalami banyak persoalan ,lemahnya sistem pengolahan basis data obyek atau subyek pajak sangat mempengaruhi pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten timor tengah selatan namun harus terus di benahi dan di tingkatkan kapasitas dan optimalisasi, Menurut data yang di dapatkan dari Kantor Badan pendapatan daerah kabupaten Timor tengah selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**

**Data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2016-2019**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PRESENTASE (%)</b>
1	2016	2,978,581,598	2,842,176,635	96
2	2017	3,000,196,737	2,858,317,281	94
3	2018	3,194,700,840	3,059,275,816	95
4	2019	3,374,613,044	3,207,367,644	97

Sumber:bapenda TTS Tahun 2016-2019

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa dari tahun ke tahun target dan penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten timor tengah selatan mengalami perubahan pada setiap tahunnya.

**Tabel 1.1Data pendapatan asli daerah tahun 2016-2019**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>TARGET (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>PRESENTASE (%)</b>
1	2016	55,610,758000	55,056,463,427	99
2	2017	89,071,265351,97	69,299,581,934,	77,80
3	2018	111,360,200,147	65,898,311,896,00	59,18
4	2019	94,935,613,809	76,576,128,220	80,6

Sumber:bapenda TTS Tahun 2016-2019

Dari data pendapatan asli daerah dari tahun 2016 – 2019 belum mencapai target oleh karna itu maka perlu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk mencapai target yang sudah ditetapkan dan salah satu

penerimaan yang perlu terus di tingkatkan adalah penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Penelitian ini bukanlah satu satunya penelitian yang mengangkat tentang upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak bumi dan bangunan namun sebelum nya ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Drs H ishak ,Msi dengan judul pengelolaan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan di kabupaten kuantan singingi tahun 2014-2015 jenis penilitian ini adalah deskriptif dengan metode kullitatif dan hasil dari penelitian adalah pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang dalam pengelolaannyaperlu peningkatan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah berdasarkan keadaan dan potensi masyarakat ,menetapkan sesuai dengan kondisi masyarakat serta kesiapanpengelolaan pajak bumi dan bangunan melalui usaha-usaha pengelolaa yang baik dan profesional ,adapun pengelolaan yang dilakukan melalui usaha,perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh ZULKIFL,LINTJE KALANGI,HENDRIK MANOSSOH,Fakultas ekonomi dan bisnis universitas Sam Ratulangi dengan judul” analisis penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap kontribusi pendapatan asli daerah di kota Gorontalo”, Tujuan penelitian ini adalahuntuk menganalisis penerimaan PBB-P2 terhadap kontribusipendapatanasli

daerah dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung penerimaan PBB-P2 di kota Gorontalo, metode penelitian menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pemerintah kota Gorontalo sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah kodifikasi, penyajian data dan kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal) dan dependability (releabilitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 di kota Gorontalo berdasarkan rasio pengumpulan pada tahun 2012 sebesar 69,47%, tahun 2013 sebesar 74,44%, tahun 2014 sebesar 76,50%, tahun 2015 sebesar 81,26% dan pada tahun 2016 rasio penerimaan PBB-P2 adalah sebesar 86,75%. Klasifikasi penerimaan PBB-P2 di kota Gorontalo berdasarkan analisis rasio proporsi dan rasio pertumbuhan adalah potensial. Faktor-faktor penghambat penerimaan PBB-P2 terhadap kontribusi penerimaan PAD di kota Gorontalo adalah kesadaran wajib pajak, kesesuaian data, kekeliruan dalam dokumen penetapan, dan sumber daya manusia, sementara faktor-faktor yang mendukung adalah kepemimpinan, sumber daya manusia dan kompensasi.

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, untuk meramal penerimaan pajak bumi dan bangunan beberapa tahun kedepan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis upaya**

**peningkatan pendapatan asli daerah melalui penerimaan pajak bumi dan Bangunan.**

### **1.3. PERSOALAN PENELITIAN**

Pokok Permasalahan yang akan dikaji dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Profil Pajak bumi dan bangunan di kabupaten timor tengah selatan tahun 2010-2019
2. Berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dari Tahun 2010-2019
3. Bagaimana Profil Pendapatan asli daerah di kabupaten Timor tengah selatan tahun 2010-2019 ?
4. Bagaimana proyeksi penerimaan Pendapatan asli daerah di kabupaten Timor tengah selatan 10 tahun ke depan pada Tahun 2020-2029

### **4.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **a. Tujuan**

Tujuan dalam penelitian yang dilakukan pada kantor Bapenda Timor tengah selatan adalah

1. Untuk mengetahui Bagaimana Profil Pajak bumi dan bangunan di kabupaten timor tengah selatan tahun 2010-2019
2. Untuk mengetahui Berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah dari Tahun 2010-2019
3. Untuk mengetahui Bagaimana Profil Pendapatan asli daerah di kabupaten Timor tengah selatan tahun 2010-2019 ?

4. Untuk mengetahui Bagaimana proyeksi penerimaan Pendapatan asli daerah di kabupaten Timor tengah selatan 10 tahun ke depan pada Tahun 2020-2029

b. Manfaat

**a. Manfaat Akademik**

Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama ,dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas Ekonomi Universitas Artha Wacana Kupang dalam pengembangan ilmu Pengetahuan khususnya Manajemen Perpajakan dan Keuangan Daerah.

**b. Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi kantor Bapenda Kabupaten TTS
2. Sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut